

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Abidin, dan Abdullah Kelib. “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut kajian Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 1 (2018): 18.
- Aji, Prabowo Setyo. “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya.” *Pandecta* 9 (2014): 241.
- Al-ghazali, Muhammad. “Perlindungan Terhadap Hak Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.” *Qiyas* 1 (2016): 107.
- Al-Ghazi, syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qisim. *Fath Al-Qorib Al-Mujab*, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ambiyah, Fenny. “Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang),” 2011.
- Asrijal, Andi. *Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran (Efektifitas Pelaksanaan dan Kendala yang Dihadapi)*, 2022.
- . *Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran (Efektivitas Pelaksanaan dan Kendala yang Dihadapi)*. CV. Mitra Cendikia Media, 2022.
- Augusta, Siti Zahranissa Sheila, dan Dwi Aryanti Ramadhani. “Akibat Hukum Pencantuman Nama Orang Tua Angkat dalam Akta Kelahiran.” *Justitia* 8 (2021): 1005.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus (Jiwa), 2020-2022,” n.d. <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-kudus-menurut-jenis-kelamin.html>.
- . “Presentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran 2022,” n.d.
- Balaati, Dessy. “Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia.” *Lex Privatum* 1 (2013): 142.
- “Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e,” n.d.
- “Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pasal 174,” n.d.
- “Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pasal 195,” n.d.
- “Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pasal 197,” n.d.
- “Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pasal 209,” n.d.
- Clear, James. *Atomic Habits Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil*

- Luar Biasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2023.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Syarat Pembuatan Akta Kelahiran,” n.d. <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-kelahiran/>.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Adopsi Anak Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” n.d. <https://disdukcapil.pontianak.go.id/adopsi-anak-dalam-perspektif-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-ditulis-oleh-dini-eka-wahyuni>.
- . “Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Catatan Sipil,” n.d. <http://disdukcapil.sumutprov.go.id/berita/detail/tugas-pokok-dan-fungsi-bidang-catatan-sipil->.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. “Jenis Jenis Akta Kelahiran,” 2023. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/yuk-kenali-berbagai-jenis-akta-kelahiran>.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Jumlah Akta Kelahiran 2022,” 2022. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan>.
- Dwikowati, Francisca Vani. “Proses pengangkatan Anak dan Dampak hukum pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian dan Pewarisan (Studi Kasus di Kabupaten Klaten).” *Islamic family law* 7 (2023): 95.
- Eltsany, Azkiya Zahrul Asmi, dan Misbahuzzulam. “Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris.” *Alwatzikhoebillah* 9 (2023): 45.
- Halim, Abdul, dan Khizaimah. “Adopsi Anak dalam Tinjauan Madzhab Syafi’i.” *Masadir* 1 (2021): 82.
- Ishak. “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia.” *Kanun* 19 (2017): 575.
- Isnaini, Enik. “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Independent* 5 (2017): 24.
- Jauhari, Iman. *Hukum Waris Islam*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Keller, Jeff. *Attitude Is Everything Sikap Adalah Segalanya Hidupmu Bakal Sukses Kalau Mentalmu Beres*. Jakarta: Rene Turos, 2022.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Akta Kelahiran,” n.d.
- “Kitab Undang Undang hukum Perdata Pasal 832,” n.d.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Memasuki Tahun 2022: KPAI Dorong 5 Juta Anak Mendapatkan Akta Kelahiran,” 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/memasuki-tahun-2022-kpai-dorong-5-juta-anak-mendapatkan-akta-kelahiran>.

- Mansyur, Andi Ahmad Suhar. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris.” *Jurnal Karya Ilmiah*, 2013.
- Moechthar, Oemar. *Dasar-dasar teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga, 2017.
- Nies, Mary A., dan Melanie Mcewen. *Elsevier (Keperawatan kesehatan Komunikasi dan keluarga)*, 2019.
- Nurmawati, Bernadete, Rinaldi Agusta Fahlevie, dan Johannes Haposan. “Akibat Hukum Terhadap Kutipan Akta Kelahiran Yang Tidak Tercatat Didalam Registernya Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta,” n.d., 555.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- “Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” n.d.
- “Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” n.d.
- “Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,” n.d.
- “Pasal 20 ayat (2) buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam,” n.d.
- “Pasal 22 huruf e Peraturan Menteri Sosial nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,” n.d.
- “Pasal 22 huruf f Peraturan Menteri Sosial nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,” n.d.
- “Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” n.d.
- “Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” n.d.
- “Pasal 98 ayat (2) buku I Hukum pernikahan Kompilasi Hukum Islam,” n.d.
- Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. “Prosedur Pengajuan Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi),” 2021. <https://posbakum.pn-telukkuantan.go.id/permohonan-pengangkatan-anak-adopsi/>.
- “Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (3),” n.d.
- “Penjelasan Pasal 19 buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam,” n.d.
- “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 19 huruf a,” n.d.
- “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 20,” n.d.

- “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 21,” n.d.
- “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 22,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (1),” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (2),” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 11 ayat (2),” n.d.
- “Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 14,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 15,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 3,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 7 huruf a,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 7 huruf b,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 8 huruf a,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 8 huruf b,” n.d.
- Rais, Muhammad. “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).” *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016): 184.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,” 2004.
- Rifan, A. Hidayatur, Salama Gozali, dan Ibnu Zaed. *Sangu Urip*. kediri: Lirboyo Press, 2022.
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Satu Data Indonesia. “Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak Kabupaten Kudus,” n.d.
https://data.kuduskab.go.id/my_MM/dataset/persentase-cakupan-kepemilikan-akta-kelahiran-pada-anak-usia-0-17-

- tahun/resource/6861b590-f162-40df-9794-8c4cfdd0cce3.
- Setiawan, Hari Harjanto. “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan anak (Birth Certificate As A Self-Identity Citizenship Rights Of Children)” 3 (2017).
- Siswosoediro, Henry s. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, 2008.
- Sugiano. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supaat, Aris, Nur, Hakim, Arif, Karim, Abdul, et al. “Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana.” *Lpm*, 2018, 1–56.
- Surat Al-Ahزاب Ayat 4-5*, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- “Tafsir Tahlili Surat Al-Ahزاب Ayat 4 & 5 Kementerian Agama Republik Indonesia,” n.d.
- Tristiana, Enis, dan Fancisca Vani Dwikowati. “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak setelah Diangkat Terkait Perwalian dan Perwarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten.” *Journal Of Islamic Family Law* 7 (2023): 99.
- “Undang Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 32,” n.d.
- “Undang Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 40,” n.d.
- “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (2),” n.d.
- “Undang Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56,” n.d.
- Utami, Wahyu, dan Peni Rinda Listyowati. “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran.” *Prosiding*, 2020, 365.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Pertama. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.
- Wulandari, Andi Sri Rezky. “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 5 (n.d.): 6.
- Yunus, Saipullah M. “Penisbatan Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat di Aceh menurut Ulama Mazhab.” *Takammul* 8 (2019): 76.